



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU

PETA RENCANA POLA RUANG
KEPULAUAN MALUKU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PETA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 500.000



Sistem Koordinat
Datum Horizontal : WGS 1984

ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Gunung
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Landas Kontinen (BLK), telah di sertifikasi
- BLK, perlu kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
- Batas ZEE Indonesia, belum distifikasi
- Batas ZEE Indonesia, perlu kesepakatan
- Batas Laut Teritorial (BLT)
- BLT, perlu kesepakatan
- Jaringan Jalan
- Sungai

- Garis Pantai
- Daerah Waduk

KAWASAN LINDUNG

- Persebaran Penyusutan Hijau
- Jalur Migrasi Paus
- Jalur Migrasi Lumba-Lumba
- Cagar Alam
- Suaka Margasatwa
- Taman Nasional
- Suaka Alam Pesisir
- Taman Wisata Alam Laut/Taman Wisata Pesisir
- Habitat Lindung
- Zona Terumbu Karang

- Persebaran Ikan Duyung

KAWASAN BUDIDAYA

- Kawasan Metropolitan
- Kawasan Peruntukan Hutan
- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai, masih diunggulkan kawasan peruntukan lainnya dalam rencana tata ruang yang lebih detail
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral, masih diunggulkan kawasan peruntukan lainnya dalam rencana tata ruang yang lebih detail
- Kawasan Peruntukan Permukiman di Kawasan Peruntukan Hutan
- Kawasan Peruntukan Pertanian di Kawasan Peruntukan Hutan



RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU

KETERANGAN GAMBAR

SEKTOR UNGGULAN

-  Sektor Unggulan Pariwisata
-  Sektor Unggulan Perikanan

KAWASAN ANDALAN DARAT

- 1 Kawasan Andalan Seram
- 2 Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar
- 3 Kawasan Andalan Bura
- 4 Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sulawesi-Sofifi-Weda dan Sekitarnya
- 5 Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan
- 6 Kawasan Andalan Kepulauan Sula

KAWASAN ANDALAN LAUT

- 1 Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya
- 2 Kawasan Andalan Laut Arifara dan Sekitarnya
- 3 Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya

GUGUS PULAU/ KEPULAUAN (GP)

- 1 GP Moolai
- 2 GP Halmahera Utara
- 3 GP Halmahera Barat
- 4 GP Ternate-Tidore
- 5 GP Halmahera Timur-Halmahera Tengah
- 6 GP Halmahera Selatan
- 7 G. Kepulauan Sula Bagian Timur
- 8 G. Kepulauan Sula Bagian Barat

- 9 GP Bura
- 10 GP Seram Barat
- 11 GP Seram Utara
- 12 GP Seram Selatan
- 13 GP Aron dan Pulau-Pulau Lease
- 14 GP Seram Timur
- 15 G. Kepulauan Banda
- 16 G. Kepulauan Kei
- 17 G. Kepulauan Aru
- 18 G. Kepulauan Tanimbar

- 19 G. Kepulauan Babar
- 20 G. Kepulauan Torselatan

KEDALAMAN LAUT

- 0 - 500 m
- 500 - 1000 m
- 1000 - 3000 m
- 3000 - 5000 m
- > 5000 m

SUMBER PETA:

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2000
- Peta Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) BIG, Tahun 2011
- Peta Batimetri Skala 1:1.000.000, Dinas Hidro-Oceanografi TNI-AL, Tahun 2006
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku Utara Berdasarkan SK 490/Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012, dan Provinsi Maluku Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/KP/TS-II/1999, tanggal 10 September 2012 skala 1: 250.000
- Peta Kawasan Pertanian skala 1:1.000.000, Kementerian Pertanian, Tahun 2009
- Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KEMEN ESDM), Tahun 2013
- ATLAS Sumberdaya Kelautan BIG, Tahun 2006
- Peta Sebaran Kawasan Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tahun 2010

KETERANGAN PETA:

- Kedalaman informasi peta adalah 1:500.000
- Peta ini merupakan gambaran sebaran indikator lokasi pemanfaatan ruang, dan tidak dapat digunakan untuk telah mikro serta pemberian izin pemanfaatan ruang
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Garis batas internasional mengacu pada Peta Batas NKRI BIG, Tahun 2011
- Hasil kajian Tim Teknis RTR Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 147 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

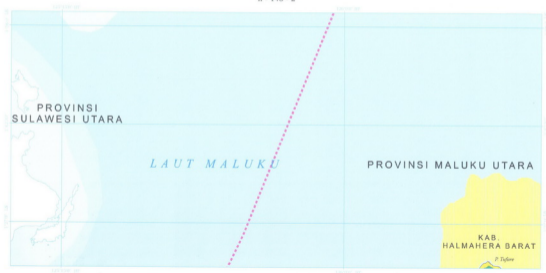
II - 147 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

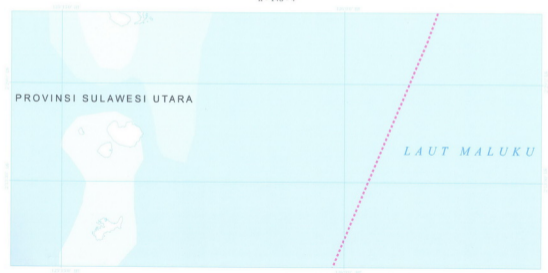
II - 148 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 148 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

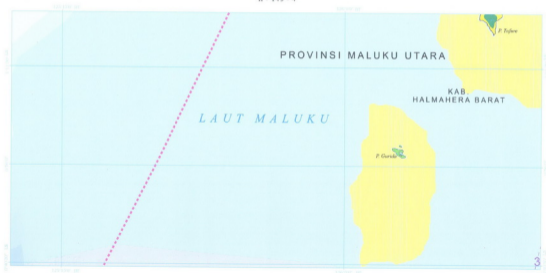
II - 149 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

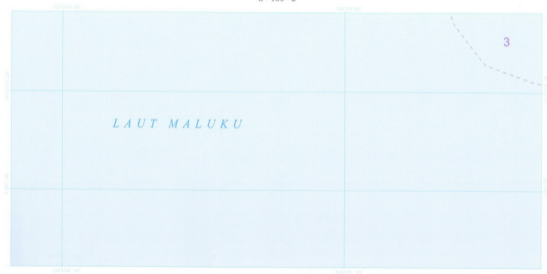
II - 149 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 150 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 150 - 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 151 - 1





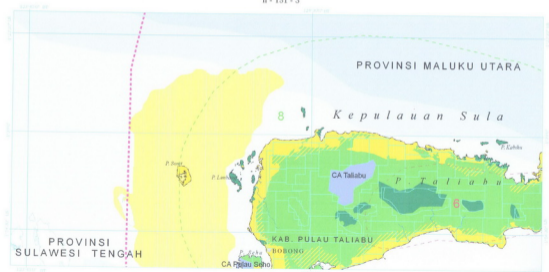
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 151 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

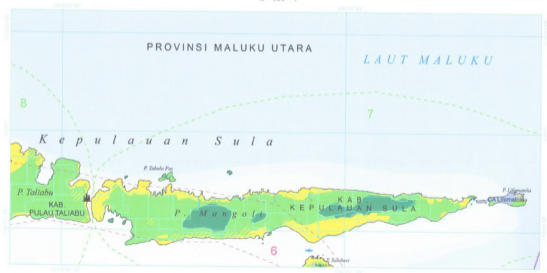
II - 151 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III - 151 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

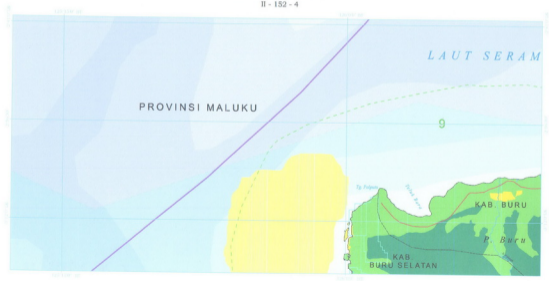
II - 152 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

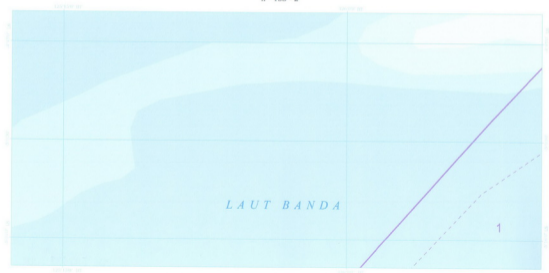
II - 152 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 153 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

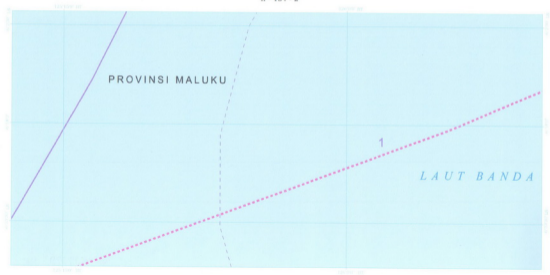
II - 153 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

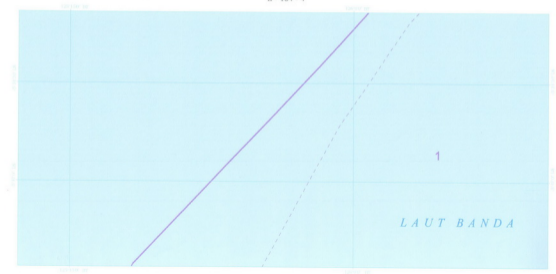
II - 154 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

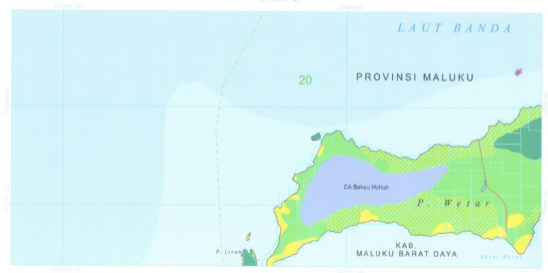
II - 154 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

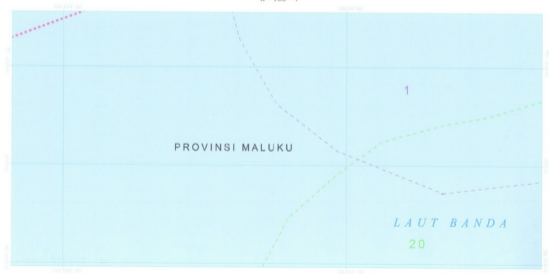
II - 155 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

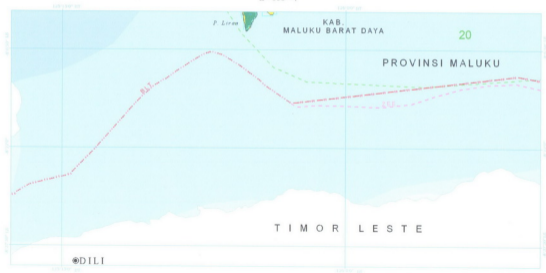
II - 155 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

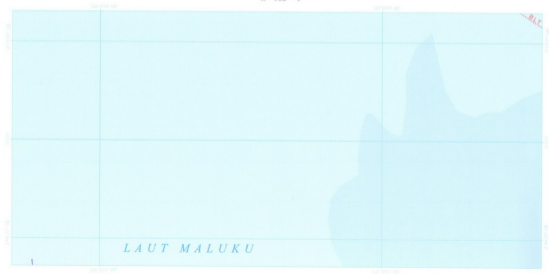
II - 156 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

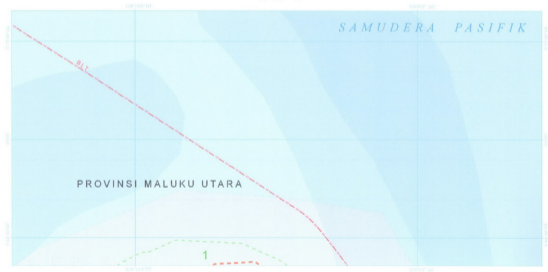
II - 162 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

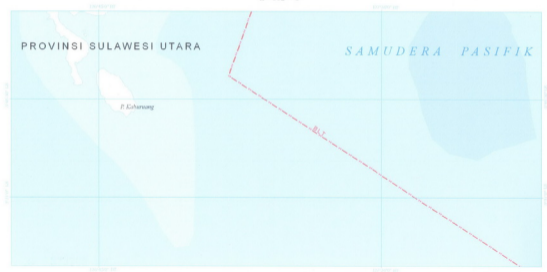
II - 162 - 2





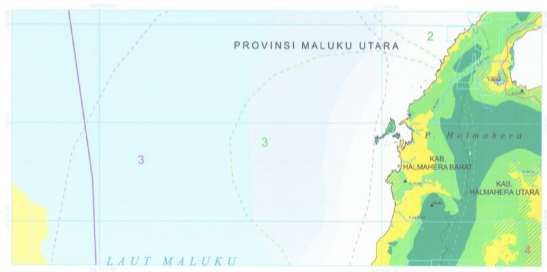
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 162 - 3





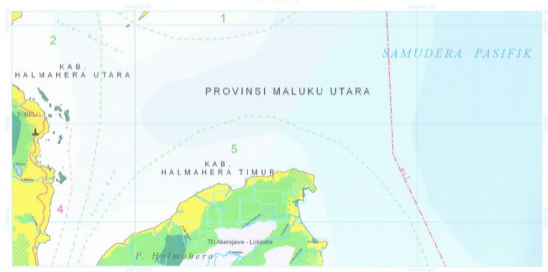
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 163 - 1





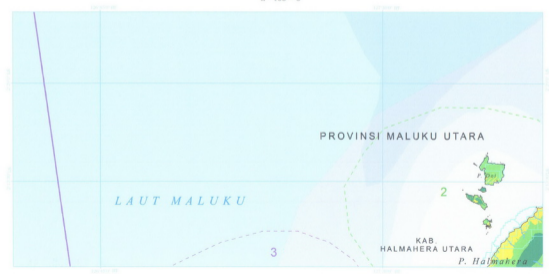
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 163 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 163 - 3





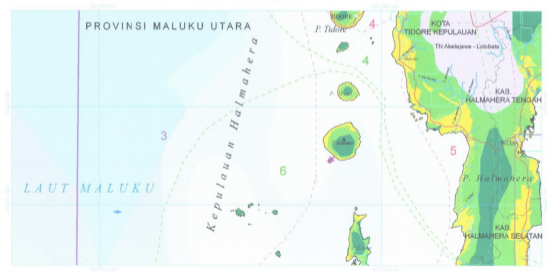
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 163 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 164 - 1



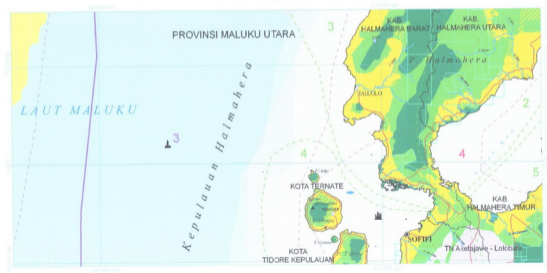


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 164 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 164 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 164 - 4



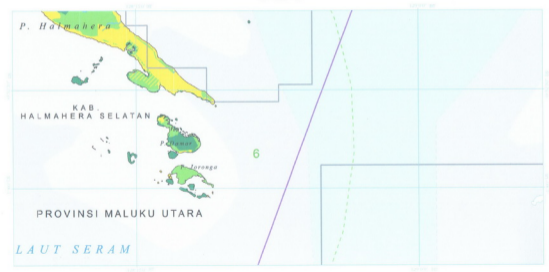


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 165 - 1



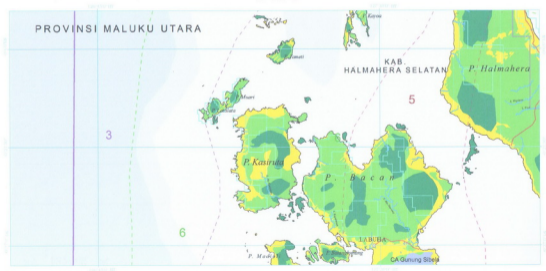


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 165 - 2



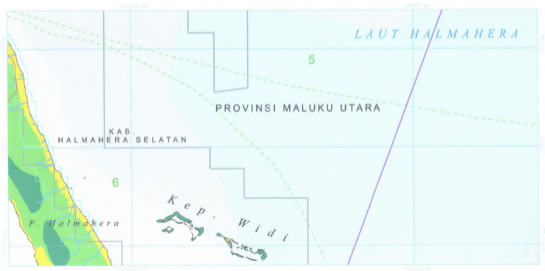


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 165 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 165 - 4



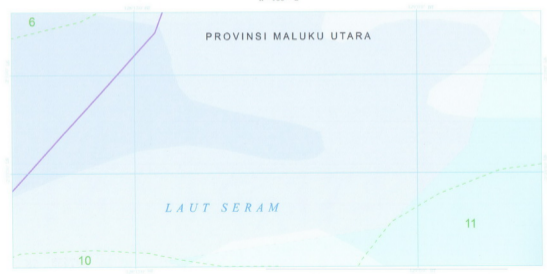


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 166 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 166 - 2



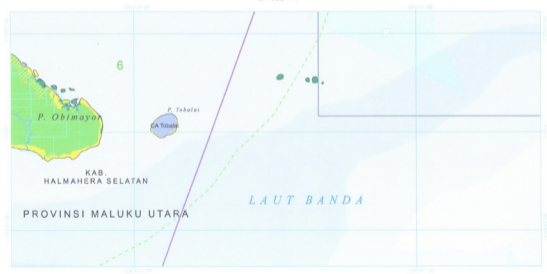


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 166 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 166 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 167 - 1



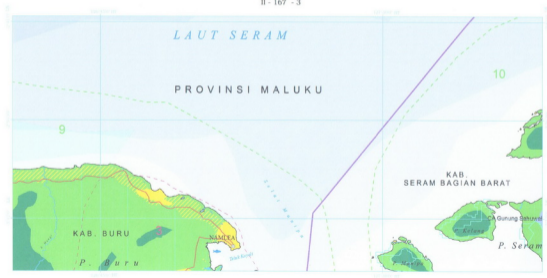


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 167 - 2



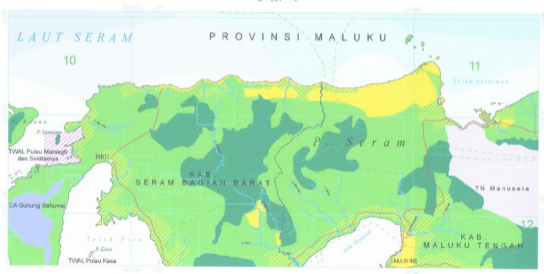


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 167 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 167 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 168 - 1

PROVINSI MALUKU

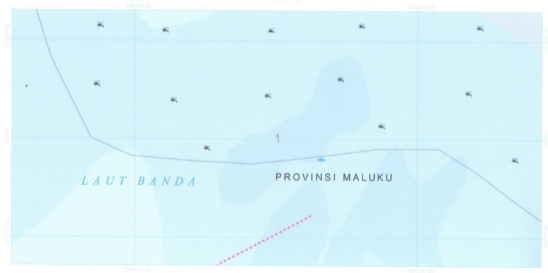
1

LAUT BANDA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

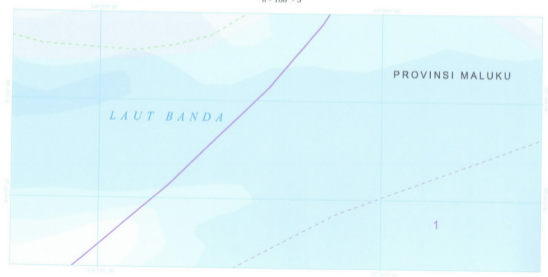
II - 168 - 2





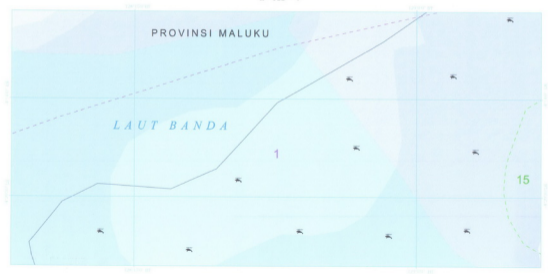
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 168 - 3



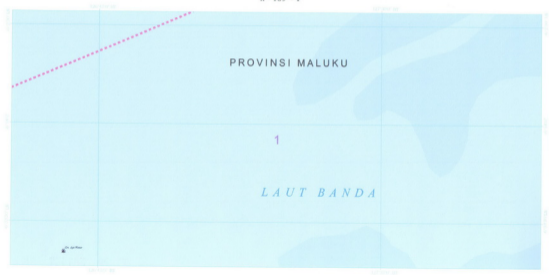


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 168 - 4



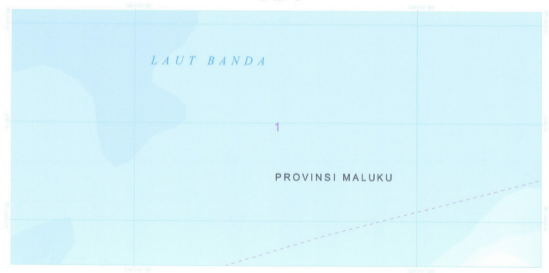


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 169 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 169 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 169 - 3

PROVINSI MALUKU

KAB.
MALUKU BARAT DAYA

1

LAUT BANDA



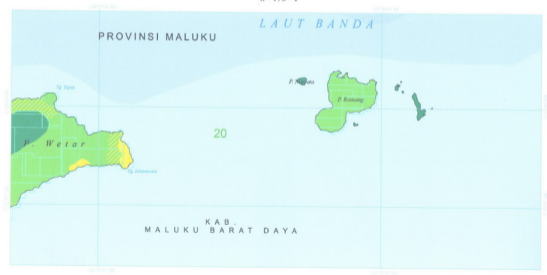
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 169 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

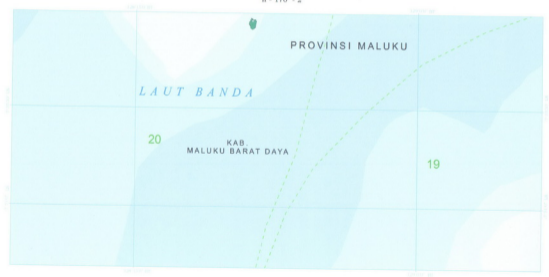
II - 170 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 170 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 170 - 3

PROVINSI MALUKU

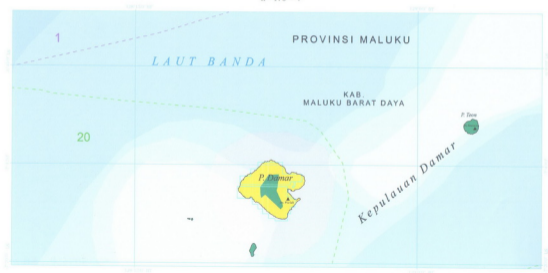
LAUT BANDA

1

20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 170 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

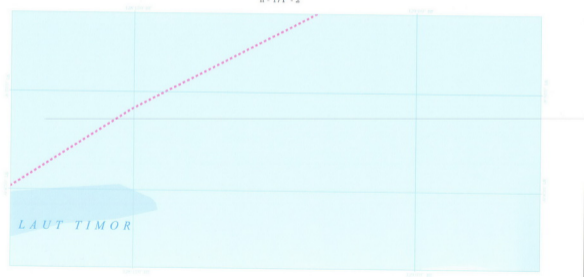
II - 171 - 1





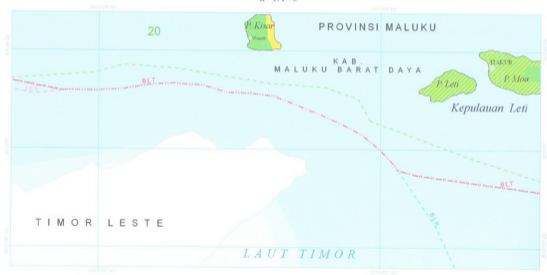
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 171 - 2





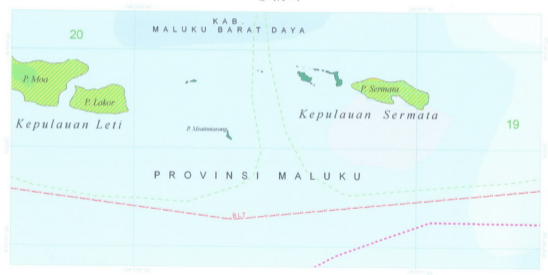
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 171 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 171 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 178 - 1

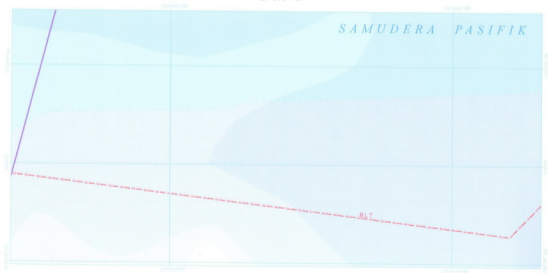




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 178 - 3

SAMUDERA PASIFIK





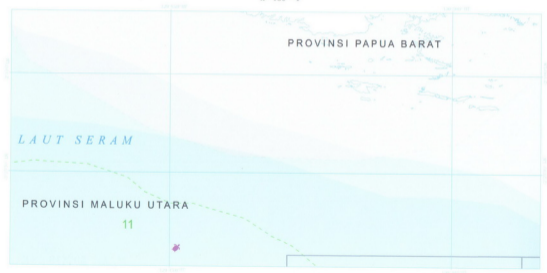
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 179 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

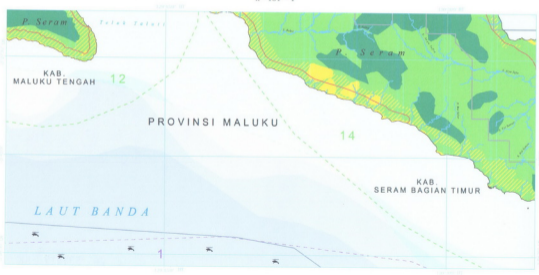
II - 180 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

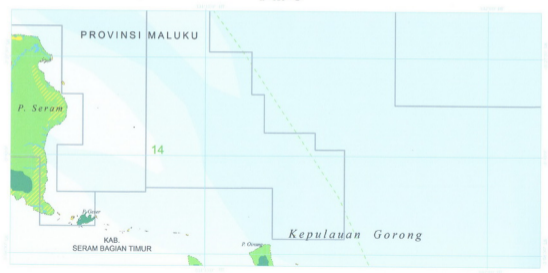
II - 181 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

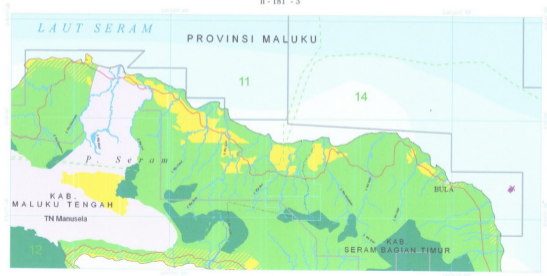
II - 181 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 181 - 3





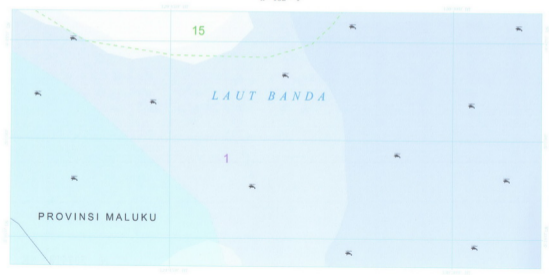
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 181 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

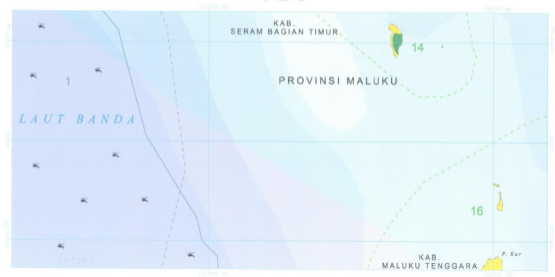
II - 182 - 1





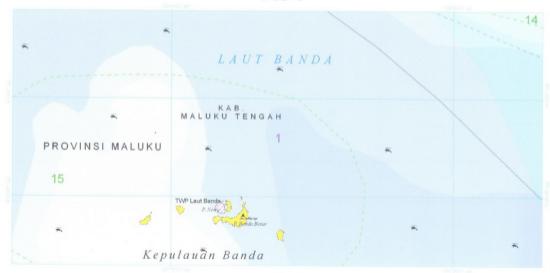
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 182 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 182 - 3





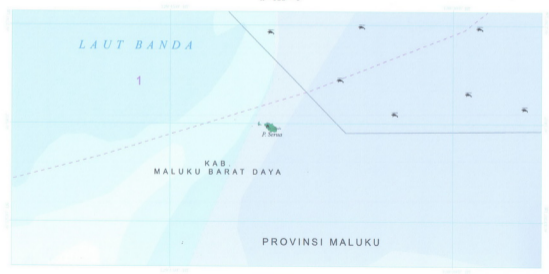
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 182 - 4





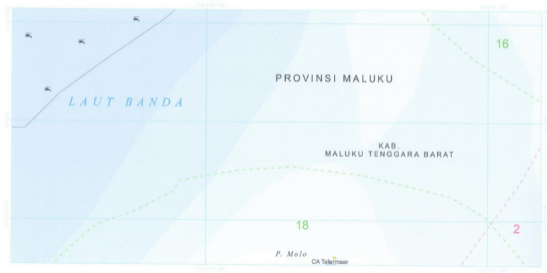
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 183 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

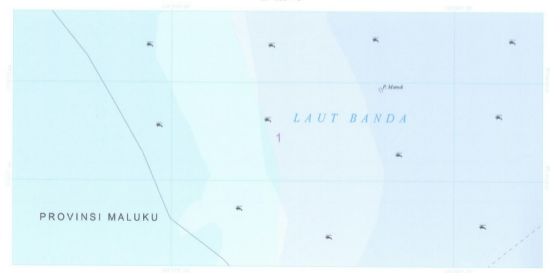
II - 183 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

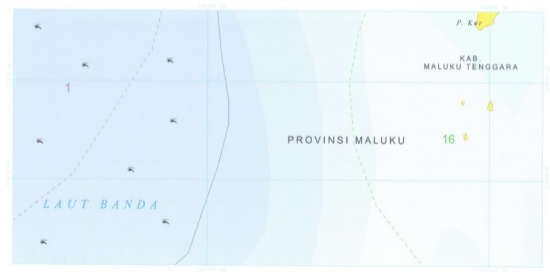
II - 183 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 183 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 184 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 184 - 2





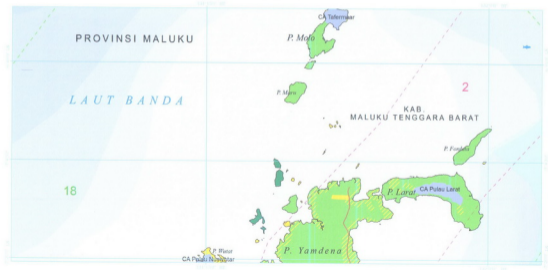
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 184 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

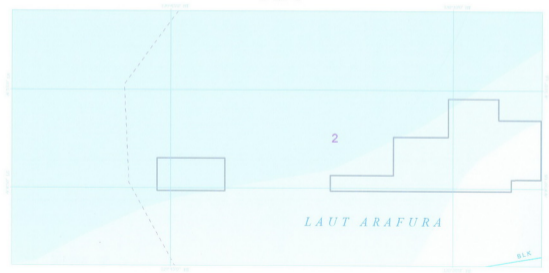
II - 184 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 185 - 1





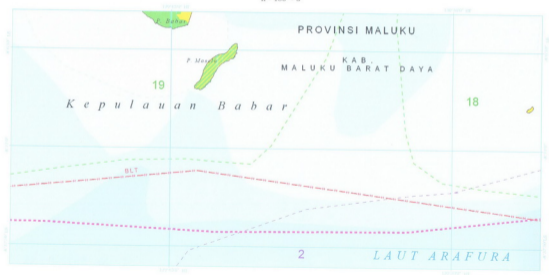
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 185 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 185 - 3



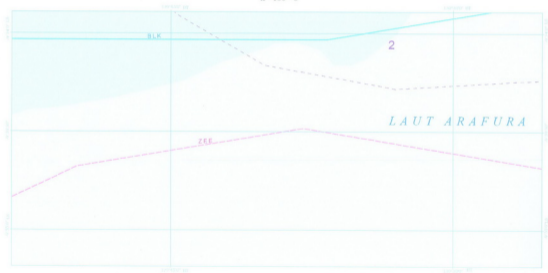


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 185 - 4





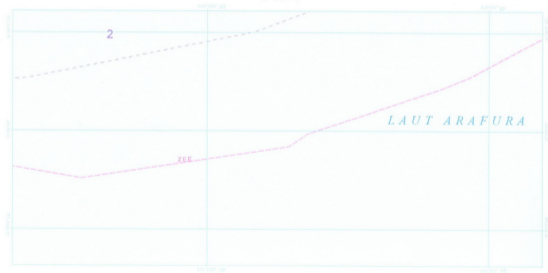
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 186 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

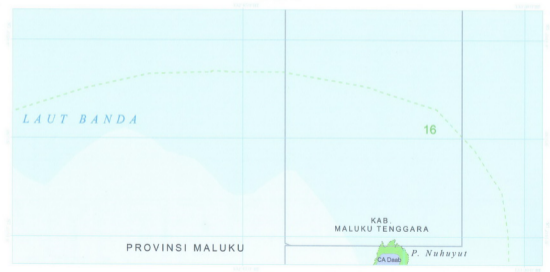
II - 186 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 194 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

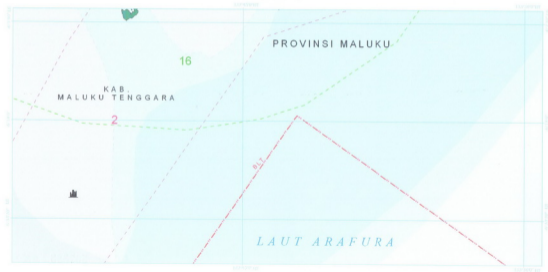
II - 194 - 2





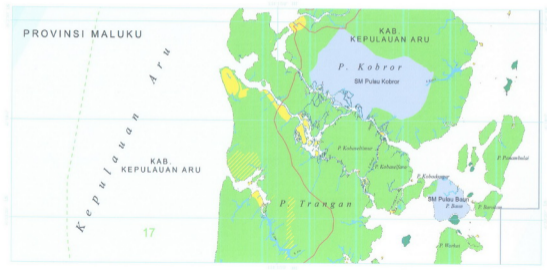
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 195 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 195 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 195 - 3





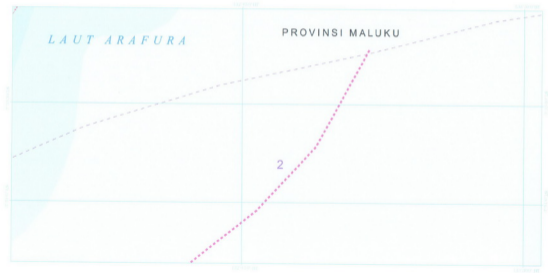
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 195 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 196 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 196 - 2

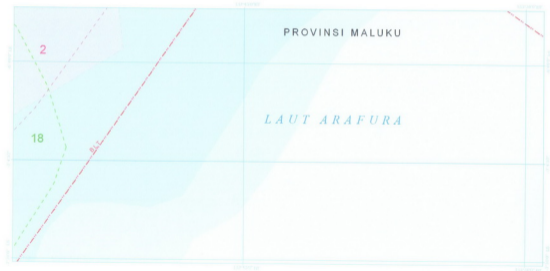
2

PROVINSI MALUKU

LAUT ARAFURA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 196 - 3





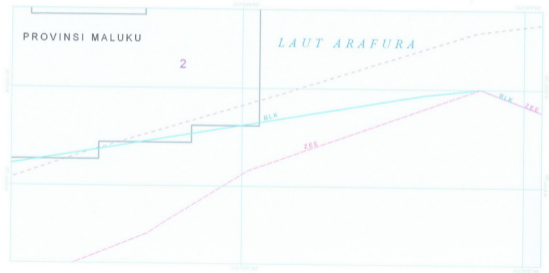
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 196 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 197 - 1

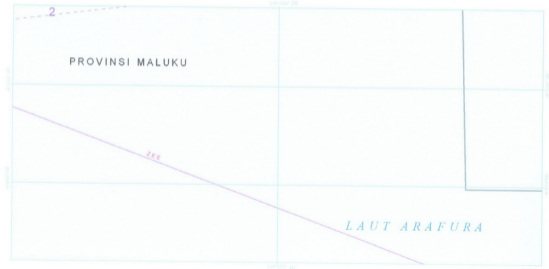




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 197 - 2

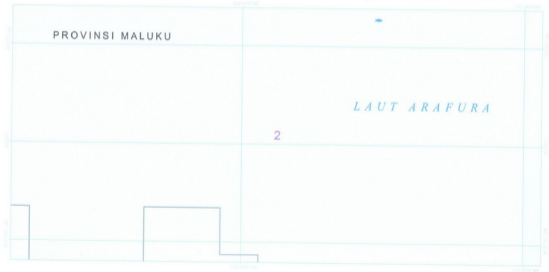
Survei 15





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 197 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 197 - 4

PROVINSI MALUKU

2

LAUT ARAFURA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

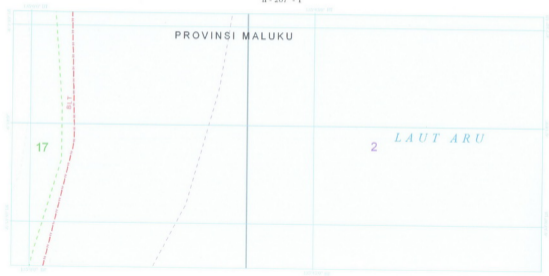
II - 206 - 1

PROVINSI MALUKU

L A U T A R U

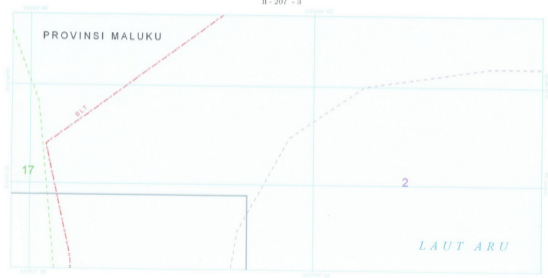


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 207 - I





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 207 - 3





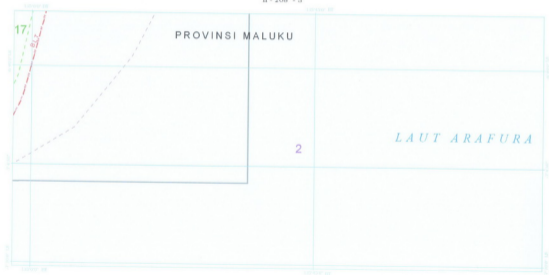
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 208 - 1





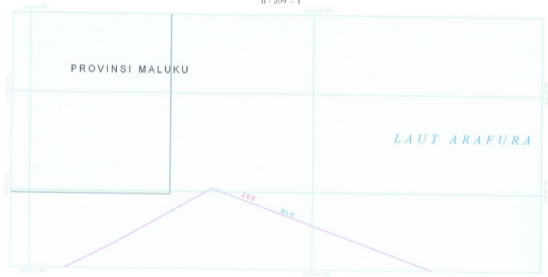
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 208 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 209 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 209 - 3

K. 209.12		PROVINSI MALUKU 2	LAUT ARAFURA
K. 209.12			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti